

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga perbankan di Indonesia sebagai lembaga yang strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional harus mampu berfungsi secara efisien, sehat, wajar dan mampu menghadapi persaingan yang semakin global, mampu melindungi dana yang disimpan oleh masyarakat, serta mampu menyalurkan dana tersebut ke bidang-bidang produktif bagi tercapainya sasaran pembangunan. Bank sebagai *intermediary* (perantara keuangan) mempunyai tugas utama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana dari pihak yang berlebihan dana (surplus unit) kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (defisit unit) pada waktu yang ditentukan (Dendawijaya, 2001, dalam Langgeng, 2003:1).

Menurut undang-undang pokok perbankan yaitu Undang-Undang No. 14 tahun 1967, menyatakan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sebuah lembaga keuangan yang bergerak di bidang perkreditan salah satunya adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang diharapkan dapat menunjang roda kegiatan usaha ekonomi, baik di bidang produksi, bidang distribusi maupun pemasaran. Kehadiran Bank Perkreditan Rakyat juga diharapkan dapat menghindarkan praktek pemerasan dari para rentenir terhadap pengusaha ekonomi golongan lemah.

Bank Perkreditan Rakyat turut pula berperan menampung dan menghimpun tabungan masyarakat, karena adanya kegiatan pembangunan di daerah-daerah. Dengan demikian BPR turut memobilisasi modal untuk keperluan pembangunan, dan turut mendidik rakyat untuk menghemat dan menabung dengan menyediakan tempat yang dekat, aman, dan mudah untuk menyimpan uang bagi penabung kecil, selain dari pada itu usaha BPR juga memberikan kredit bagi nasabahnya, pengambilan kredit pada BPR relatif sangat mudah dan cepat,

pengaruh tingkat pendapatan, tingkat bunga dan agunan (jaminan kredit) sangat berpengaruh terhadap jumlah kredit yang diterima oleh masyarakat.

Sesuai dengan UU No. 7 Tahun 1992 Pasal 13, kegiatan usaha BPR meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah;
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, atau tabungan pada bank lain.

Sedangkan berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 Pasal 14, BPR dilarang:

- a. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- c. Melakukan penyertaan modal;
- d. Melakukan usaha peransuransian;
- e. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.

BPR memiliki karakter khusus seperti memiliki berbagai bentuk pelayanan keuangan simpan dan pinjam yang terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di pedesaan dengan sistem serta prosedur yang sederhana dan sesuai dengan kebutuhan usaha mikro dan kecil (UMK) (Sutopo, 2005). Implikasinya adalah hubungan kemitraan yang bersifat mutualisme menjadi keunggulan BPR dibanding dengan bank umum (Rahman, 2004). Keberadaan BPR bagi masyarakat diharapkan mampu menjadi ujung tombak dalam pembiayaan sektor UMK. Namun demikian, penyaluran kredit bank umum terhadap UMK masih rendah, hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya, (1) masih terbatasnya informasi berkaitan UMK, (2) tingginya resiko UMK, dan (3) masih tingginya bunga kredit yang disebabkan karena perbankan belum

efisien, target profit yang harus dicapai dan adanya mekanisme *Price Leader* dan *Follower* dalam penurunan suku bunga (Baas dan Schrooten, 2005).

Bank dalam menyalurkan kredit harus melakukan analisa dari berbagai aspek yang berhubungan dengan permintaan kredit dari masyarakat sesuai prosedur dan ketentuan tentang pemberian kredit. Kepercayaan masyarakat untuk menempatkan dananya di bank maupun kepercayaan masyarakat untuk menempatkan pinjaman dari pihak bank merupakan salah satu misi yang penting bagi pihak manajemen bank yang harus selalu dijaga dan dipelihara. Karena kepercayaan masyarakat kepada pihak bank merupakan salah satu syarat yang sangat mendasar bagi *management bank* dalam menjalankan roda operasional perbankan.

Kredit perbankan yang disalurkan kepada masyarakat menurut jenisnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu kredit usaha produktif yang digunakan untuk keperluan modal usaha sedangkan jenis kredit yang lainnya adalah kredit konsumtif yang digunakan untuk kebutuhan konsumtif dari simpan pinjam. Menurut penggunaannya kredit dapat disalurkan untuk kebutuhan modal kerja usaha yang disebut Kredit Modal Kerja (KMK) dan kredit untuk kebutuhan pengadaan aktiva tetap dan inventaris usaha yang disebut Kredit Investasi. Menurut jangka waktu kredit, ada 3 (tiga) macam yaitu kredit jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Selain itu kredit yang disalurkan oleh pihak bank dapat dibedakan menurut sektor ekonomi sesuai dengan sektor yang dibiayai. Dalam rangka menunjang kegiatan ekonomi nasional lembaga perbankan perlu untuk ikut berperan serta dalam membangun pilar-pilar perekonomian nasional. Salah satunya adalah prioritas penyaluran kredit yang ditujukan kepada pihak pengusaha kecil dan menengah di Indonesia (Kuncoro, 2002:253).

Holloh (2001) melakukan studi di Jawa Timur, Bali dan NTB, menemukan bahwa rendahnya tingkat penyaluran kredit disebabkan oleh beberapa hal yaitu penagihan yang tidak lancar, SDM, dan kredit macet yang semuanya disebabkan oleh faktor eksternal dan internal seperti kondisi ekonomi, karakter dan analisis

ke kredit yang kurang memadai. Rendahnya kualitas port folio hutang, nilai *collateral* (jaminan) yang rendah terhadap kemungkinan kerugian pinjaman juga merupakan faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kemampuan BPR dalam menyalurkan pembiayaan kepada UMK. Lebih lanjut studi Holloh juga mengatakan bahwa ada dua alasan mengapa penyaluran kredit oleh BPR rendah yaitu tidak adanya *supervise* atas kredit yang disalurkan dan tingginya tingkat bunga kredit BPR dibandingkan dengan lembaga keuangan seperti bank umum, dimana bank ini merupakan pesaing BPR dalam menyalurkan kredit pembiayaan kepada UMK.

Persaingan antara BPR dengan BPR yang lain ataupun dengan lembaga sejenis lainnya seperti bank umum, koperasi dan pegadaian akan mempengaruhi kemampuan BPR untuk tetap hidup dan berkembang. Berkaitan dengan persaingan dalam lembaga keuangan mikro, Schafes Siliverstovs dan Terberges (2005) dalam penelitian mereka mengemukakan persaingan berkorelasi negatif dengan profitabilitas dan tingkat bunga pinjaman, namun persaingan berbanding positif dengan jangkauan (*outreach*) daerah dan segmen konsumen. Semakin tinggi tingkat persaingan maka semakin dituntut manajemen organisasi untuk mengelola usahanya menjadi berorientasi konsumen dan memperhatikan perubahan faktor lingkungan (Pearce dan Robinson, 2000; Porter, 1980). Namun demikian, BPR mempunyai prospek bagus kedepan karena hal ini berhubungan dengan pengembangan UMK, dimana UMK memainkan peranan, yang sangat besar dalam perekonomian baik di negara maju maupun di negara berkembang seperti Indonesia.

PT. Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan berdiri melalui akuisisi dari PT. Bank Perkreditan Rakyat "Artha Nyata" dan pada tanggal 11 Juli 2002 PT. Bank Perkreditan Rakyat Artha Nyata diubah menjadi PT. Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan. Maksud dan tujuan didirikannya PT. BPR Kota Pasuruan adalah untuk mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah di segala bidang dalam rangka meningkatkan taraf hidup

masyarakat serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Produk yang dijual kepada nasabah terdiri dari produk simpanan maupun produk pinjaman, meliputi: Simpanan Masyarakat Kota (SIMKOT), Simpanan Anak Sekolah (SIMAS), Simpanan Kaleng (SIMKA), Deposito Berjangka, Kredit Modal Kerja (KMK), Kredit Pegawai, Kredit Pasar (KIPAS), Kredit Program dan Kredit Mikro (PKM). Untuk itulah dilakukan penelitian dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Kredit Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan di Kotamadya Pasuruan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah bahwa lembaga keuangan mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Melalui lembaga keuangan lokal seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR) diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik. Dengan memberikan pelayanan keuangan perbankan seperti halnya simpan dan pinjam yang terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dari masyarakat di pedesaan, maka perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh pendapatan nasabah terhadap permintaan kredit pada PT. BPR Kota Pasuruan di Kotamadya Pasuruan?
2. Seberapa besar pengaruh tingkat pendidikan terhadap permintaan kredit pada PT. BPR Kota Pasuruan di Kotamadya Pasuruan?
3. Seberapa besar pengaruh agunan terhadap permintaan kredit pada PT. BPR Kota Pasuruan di Kotamadya Pasuruan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh pendapatan nasabah terhadap permintaan kredit pada PT. BPR Kota Pasuruan di Kotamadya Pasuruan;
2. Pengaruh pendidikan terhadap permintaan kredit pada PT. BPR Kota Pasuruan di Kotamadya Pasuruan;
3. Pengaruh agunan terhadap permintaan kredit pada PT. BPR Kota Pasuruan di Kotamadya Pasuruan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai:

1. Bahan sumbangan pemikiran bagi BPR dan pertimbangan dalam menetapkan kebijaksanaan penyaluran kredit dimasa yang akan datang;
2. Bahan pengetahuan dan pemahaman peneliti terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap permintaan kredit;
3. Bahan studi untuk penelitian yang sejenis dengan masalah ini dalam lingkup dan waktu yang berbeda.